



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Akan Putus Uji Materi UU Pemilu**

**Jakarta, 27 Maret 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada Kamis (28/3), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 93/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Palaloi, Melianus Laoli, Abdul Rasyid, Sitefano Gulo dan Alex, sebagai Pemilih dan Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam permohonannya Para Pemohon berpendapat bahwa penyebaran populasi penduduk yang tidak merata serta SDM yang sangat minim dikhawatirkan akan menimbulkan hambatan dan pelanggaran dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Hal ini akan menyebabkan Pemilu tidak dapat berintegritas dan bermartabat karena kurangnya pengawasan.

Selain itu menurut para Pemohon, penambahan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dinilai perlu untuk mengimbangi personil atau anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan guna tercapainya pemilu yang demokratis.

Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna menanggapi permohonan para Pemohon pada sidang Pendahuluan (21/11), dengan mencermati tidak disertakannya pasal dan bunyi-bunyi pasal dari norma yang diujikan. Hal tersebut menurut Palguna berkaitan dengan kerugian konstitusionalitas serta kedudukan hukum para Pemohon. "Oleh karena itu, sebelum menguraikan *legal standing*, maka sebutkan bunyi normanya serta uraikan kerugian konstitusional para Pemohon dan sebutkan pula hubungan *causal verband* antara norma dengan kerugiannya," saran Palguna.

Dalam sidang Perbaikan Permohonan (4/12), Mustafa selaku Kuasa Hukum Pemohon mempertegas bahwa para Pemohon pernah menjabat sebagai Anggota KPU dan sebagai penyelenggara pemilu di daerah masing-masing.

Kasubdit Bidang Polhukam Kemenkum HAM RI, Purwoko, yang hadir dalam Sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pemerintah (9/1) mengatakan, pengurangan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang semula berjumlah lima orang menjadi tiga orang merupakan salah satu upaya Pemerintah melakukan efisiensi pendanaan pemilu. Dengan pengurangan tersebut, Pemerintah mengharapkan APBN dapat diprioritaskan untuk pendanaan lainnya. Selain itu menurut Purwoko, apabila para Pemohon ingin melakukan perubahan terkait UU *a quo* di masa mendatang menjadi lima orang, tambah Purwoko, pengubahannya harus melalui revisi peraturan perundang-undangan dan bukan melalui pengujian undang-undang di MK, jelasnya.

Seharusnya, Sidang pada tanggal (17/1) beragendakan mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Namun sidang tersebut ditunda karena Pemohon terlambat menyerahkan keterangan tertulis Ahli.

Sedangkan dalam sidang dengan agenda mendengarkan Ahli Pemohon, Para Pemohon menghadirkan Ahli Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Bambang Eka Cahya Widodo, dirinya menyampaikan bahwa pentingnya penambahan anggota badan pengawas pemilu (Bawaslu) sebenarnya disadari pembentuk undang-undang, namun aturan jumlah anggota Bawaslu yang hanya tiga orang diambil berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk dan pemilih. Akan tetapi, hal tersebut tidak relevan karena sebenarnya dinamika politik pemilu bergantung pada peserta pemilu dan profesionalitas penyelenggara, bukan bergantung pada pemilih, ujarnya. **(ASF/SRI)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)